



PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rahmawati Nilamsari^{a,1,*}

^aUniversitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Sleman 55293, Yogyakarta
rahmawatinilamsari6@gmail.com

*corresponding author

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Retribusi Parkir terhadap PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi bulanan selama tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PKB, BBNKB, dan PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi seluruh sumber penerimaan transportasi tetap penting dalam mendukung PAD secara berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 September 2025

Revised: 27 Desember 2025

Accepted: 6 Mei 2026

Keywords

PKB

BBNKB

PBBKB

Retribusi Parkir

PAD

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pendapatan dan belanja untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui otonomi fiskal, daerah diberi keleluasaan untuk menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal menjadi tujuan utama agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam praktiknya,

keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019.

PAD terdiri dari beberapa sumber utama yaitu pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Di antara sumber tersebut, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD. Pajak daerah memberikan gambaran kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang PAD-nya didominasi oleh pajak daerah, terutama dari sektor kendaraan bermotor. Berdasarkan data BPS (2020–2024), jumlah kendaraan bermotor di DIY menunjukkan tren peningkatan signifikan, meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor menunjukkan potensi besar dalam penerimaan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, adanya fluktuasi jumlah kendaraan juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak. Dengan demikian, penting untuk menelaah apakah pertumbuhan kendaraan berbanding lurus dengan kenaikan PAD.

Penerimaan pajak daerah di DIY sebagian besar berasal dari PKB, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan retribusi parkir. Data BPKA DIY (2020–2024) menunjukkan tren peningkatan penerimaan dari keempat komponen tersebut, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya potensi besar sektor kendaraan bermotor terhadap PAD. Namun, realisasi penerimaan masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun kontribusi pajak kendaraan bermotor cukup besar, efektivitas pemungutan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nurhayati dkk. (2023) menemukan bahwa PKB berkontribusi besar pada peningkatan PAD. Febrilia dkk. (2023) menegaskan pentingnya BBNKB sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Rusli dan Sabri (2023) menyatakan bahwa PBBKB memiliki pengaruh signifikan, sedangkan Rachman dkk. (2021) menunjukkan retribusi parkir turut mendukung peningkatan PAD. Namun, sebagian besar penelitian hanya menyoroti kontribusi masing-masing jenis pajak secara terpisah. Masih jarang penelitian yang mengkaji kontribusi keempat komponen pajak kendaraan bermotor secara komprehensif terhadap PAD DIY.

2. Landasan Teori

2.1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991) sebagai pencetus teori *stewardship*, teori ini berakar pada aspek psikologis yang menekankan bahwa individu atau pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya akan bertindak sebagai *steward* atau pengelola yang bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Berbeda dengan teori agensi yang mengasumsikan bahwa individu cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, teori *stewardship* lebih menekankan bahwa pengelola memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi atau kepentingan masyarakat luas. *Stewardship theory* memandang bahwa manusia, dalam konteks

pengelolaan organisasi, dapat dipercaya untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan menjalankan tugasnya secara amanah untuk kepentingan publik maupun *stakeholders* secara umum (Donaldson & Davis, 1991).

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya ekonomi lokal yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam konteks penelitian ini, PAD dipengaruhi oleh penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Parkir yang menjadi bagian dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian fiskal yang kuat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Christianingrum & Aida, 2021).

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak di wilayahnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.4. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh individu maupun badan hukum di suatu wilayah. Pajak ini berfungsi sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mengatur kepemilikan kendaraan guna mengurangi dampak negatif seperti kemacetan dan pencemaran lingkungan (Mardiasmo, 2018).

2.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Definisi mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, BBNKB memiliki peran penting dalam menambah pendapatan daerah, terutama dari transaksi jual beli kendaraan bermotor. Menurut Sugiyono (2022), penerimaan dari BBNKB cenderung meningkat seiring dengan tingginya tingkat transaksi kendaraan di suatu daerah.

2.6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan asli daerah (PAD) melalui konsumsi bahan bakar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 23, objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor. Lebih lanjut Pasal 24 menerangkan bahwa subjek PBBKB adalah konsumen BBKB, sedangkan Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau

Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB, sementara itu pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

2.7. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas penggunaan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi ini dikenakan kepada pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, retribusi parkir dikenakan sebagai upaya pemerintah dalam mengelola transportasi dan ruang parkir.

3. Method

3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode dengan dilandaskan kepada filsafat positivisme dan dipakai dalam mengukur keterkaitan antar variabel secara objektif dengan data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2022). Sedangkan, sumber data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari BPKA DIY.

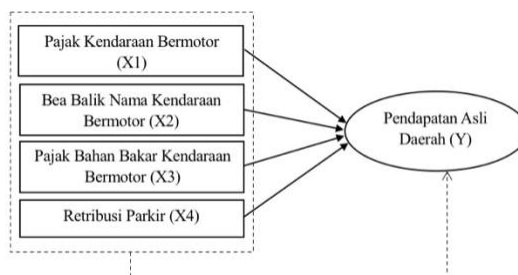
3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi bulanan atas penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, retribusi parkir, dan PAD tahun 2020 – 2024. Sementara itu, sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Sugiyono (2022) menjelaskan, sampel jenuh merupakan metode pengambilan sampel di mana seluruh populasi dijadikan menjadi sampelnya.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Seluruh data diolah dengan bantuan software SPSS versi 30.

3.5. Kerangka Penelitian



- H1 : PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY
- H2 : BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY
- H3 : PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY
- H4 : Retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asym. Sig. (2-tailed)
Sampel Kolmogorov-Smirnov	0.076

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Tabel di atas menyajikan hasil analisis yang mengindikasikan bahwa penelitian ini melibatkan 60 sampel data. Distribusi data tersebut menunjukkan kecenderungan mengikuti pola normal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Kolmogorov-Smirnov yang berada di atas ambang signifikansi, yakni sebesar 0.076. Nilai ini mengonfirmasi bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar regresi.

4.1.1 Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

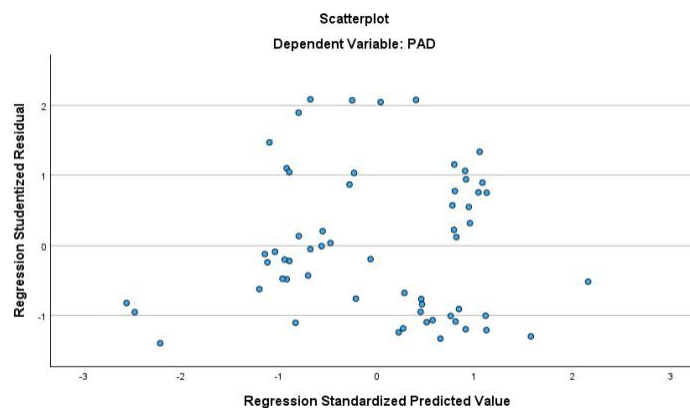
Variabel	Tolerance	VIF
PKB	0.602	1.660
BBNKB	0.562	1.781
PBBKB	0.427	2.342
Retribusi Parkir	0.509	1.963

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Tabel di atas mempertegas bahwa semua variabel memenuhi kriteria bebas multikolinearitas, ditandai dengan nilai Tolerance di atas 0.10 dan VIF di bawah 10. Dengan demikian, model antar variabel dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar tersebut, tidak tampak pola yang sistematis, sebaran titik terlihat acak dan tersebar di sekitar sumbu Y, baik di atas maupun di bawah angka nol. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data ini tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas.

4.1.3 Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

dL	dU	DW	4-Du	4-dL
1.4443	1.7274	2.036	2.2726	2.5557

Merujuk pada Tabel di atas, nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan adalah sebesar 2.036. Berdasarkan kriteria pengujian autokorelasi, kondisi bebas autokorelasi tercapai apabila nilai DW berada di antara batas atas (dU) dan nilai 4 dikurangi dU, yaitu dalam interval $1.7274 < 2.036 < 2.2726$. Karena nilai DW terletak dalam rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya gejala autokorelasi.

4.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	beta	t hitung	Sig t
(Constant)	1.349		1.069	0.290
PKB	0.333	0.282	2.952	0.005
BBNKB	0.291	0.274	2.770	0.008
PBBKB	0.277	0.310	2.734	0.008
Retribusi Parkir	0.044	0.148	1.425	0.160
F hitung	31.742			
Sig F	<0.001 ^b			
R Square	0.676			
Variabel Dependen	PAD			

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Merujuk pada hasil data yang telah diolah, nilai yang digunakan untuk membentuk model regresi linier berganda dalam tabel tersebut berasal dari kolom B. Dari proses analisis diperoleh nilai konstanta sebesar 1.349. Adapun nilai koefisien untuk setiap variabel independen adalah sebagai berikut: variabel PKB 0.333, variabel BBNKB sebesar 0.291, variabel PBBKB sebesar 0.277, dan variabel Retribusi Parkir sebesar 0.044. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka model regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 1.349\alpha + 0.333 \text{ PKB} + 0.291 \text{ BBNKB} + 0.277 \text{ PBBKB} + 0.044 \text{ Retribusi Parkir} + e$$

Dari model tersebut, dapat dijelaskan beberapa interpretasi sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1.349 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai PAD diperkirakan sebesar 1.349 satuan.
- 2) Koefisien regresi PKB yang bernilai positif sebesar 0.333 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PKB sebesar satu satuan akan memberikan kontribusi peningkatan terhadap PAD sebesar 0.333, dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi tetap.
- 3) Koefisien regresi BBNKB sebesar 0.291 juga menunjukkan pengaruh positif, yang berarti bahwa peningkatan satu satuan pada BBNKB akan meningkatkan PAD sebesar 0.291, jika variabel lain tidak berubah.
- 4) Koefisien regresi PBBKB sebesar 0.277 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada PBBKB akan memberikan dampak peningkatan PAD sebesar 0.277, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.
- 5) Terakhir, koefisien regresi Retribusi Parkir yang bernilai 0.044 menandakan bahwa setiap peningkatan Retribusi Parkir sebesar satu satuan akan mendorong kenaikan PAD sebesar 0.044, apabila variabel lainnya tidak mengalami perubahan.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Nilai F hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	0.631	4	0.158	31.742	<0.001 ^b
	Residual	0.273	55	0.005		
	Total	0.904	59			
a. Dependent Variable: PAD						
b. Predictors: (Constant), Retribusi Parkir, BBNKB, PKB, PBBKB						

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Merujuk pada hasil analisis data yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7, nilai F-hitung tercatat sebesar 31.742 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.001. Mengingat nilai signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PKB, BBNKB,

PBBKB, dan Retribusi Parkir secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid dan layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

4.3.2 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian regresi berganda yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Koefisien Determinasi				
Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.835 ^a	0.698	0.676	0.07048
a. Predictors: (Constant), Retribusi Parkir, BBNKB, PKB, PBBKB				
b. Dependent Variable: PAD				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Mengacu pada Tabel 4.8, nilai *Adjusted R Square* tercatat sebesar 0.676 atau setara dengan 67.6%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel PKB, BBNKB, PBBKB, dan Retribusi Daerah secara simultan mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen, yakni PAD sebesar 67.6%. Adapun sisanya, sebesar 32.4%, dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar cakupan model regresi dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji t

Coefficient ^a						
Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.349	1.263		1.069	0.290
	PKB	0.333	0.113	0.282	2.952	0.005
	BBNKB	0.291	0.105	0.274	2.770	0.008
	PBBKB	0.277	0.101	0.310	2.734	0.008
	Retribusi Parkir	0.044	0.031	0.148	1.425	0.160
a. Dependent Variable: PAD						

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Melalui sampel yang digunakan yaitu sejumlah 60 dan tingkat signifikansi adalah 0.05 maka didapatkan t-tabel sebesar 2.004. Hasil pengujian sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.9 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel PKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.005 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $2.952 > 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel PKB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 2) Variabel BBNKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $2.770 > 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel BBNKB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 3) Variabel PBBKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $2.734 > 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel PBBKB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 4) Variabel Retribusi Parkir menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.160 > 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $1.425 < 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.

5. Kesimpulan

Meninjau hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Variabel PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Semakin tinggi penerimaan dari PKB, maka semakin tinggi pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa PKB merupakan sumber pajak potensial yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah.
2. Variabel BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Peningkatan aktivitas jual beli kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya penerimaan BBNKB, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD di daerah.
3. Variabel PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Semakin tinggi konsumsi bahan bakar oleh masyarakat, semakin besar pula kontribusi PBBKB dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah.
4. Variabel Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi parkir memberikan pemasukan, namun jumlah dan efektivitasnya belum cukup kuat untuk memengaruhi PAD secara signifikan.
5. Variabel PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F dengan nilai signifikansi < 0.001 , yang menunjukkan bahwa keempat variabel bersama-sama dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada PAD.
6. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.676 menunjukkan bahwa sebesar 67.6% variasi yang terjadi pada PAD dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir. Sementara itu, sisanya sebesar 32.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., Sulaiman, & Nurhasanah. (2024). Implikasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi, Ekonomi, dan Akuntansi*, 10(4), 2444-2451.
- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) lebih dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017–2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117-127.
- Azhari, Devi, S., Zihnil, A., Martin K., dan Nana, S. (2023). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *Journal Of Social Science Research* 3 (2), 8010–25.
- Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah. *Journal Budget*, 6 (1), 58-72.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Djambula, O., Kalangi, J. B., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 49-60.
- ErwinE. (2024). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(2), 484-493.
- Febriilia, A., Yulistina, Y., & CN, Y. (2024). Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2023. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2410–2422.

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi. *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 15(2), 48–60. *Jurnal Keuangan Daerah*, 14(2), 100-120.
- Ipu, R. V., Karamoy, H., & Kindangen, W. D. (2022). Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 827-836.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Astari, N. (2024). Analisis efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Akuntansi*, 24(1), 81-86.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Diakses dari https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2022/lkpp_2022_1687233330.pdf
- Kuncoro, M. (2020). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laila, L., Irawan, A., & Sagitarius, E. (2024). Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 66-80.
- Macpal, M. K., Kalangi, L., & Weku, P. (2023). Analisis penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dan setelah kenaikan harga BBM pada tahun 2022 terhadap kontribusi pendapatan pajak daerah di Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 302-310.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Andi. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nanda Putri Hawa, Sri Mulyani, & Bella Puspita Audina. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Wilayah Jakarta Utara). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6914–6921.
- Nurhayati, S., Fitrawansyah, & Riyanto, D. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25554–25565.
- Oktaviani, L., Sutanto, H., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 505-513.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Rifkhan, M. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Rusli, N., & Sabri, N. R. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 180-195.

Sauyai, A., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong tahun 2014–2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 45-60.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.